

CBDS Commentaries merupakan analisis singkat terhadap isu-isu kontemporer dalam kajian diplomasi, bisnis, dan hubungan internasional yang memiliki relevansi dengan posisi dan peran Indonesia di dunia internasional. Pandangan yang ada di publikasi ini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan merupakan pandangan Centre for Business and Diplomatic Studies.

## Pelajaran dari Vladivostok

Pertemuan para pemimpin Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Vladivostok baru saja berakhir. Apakah arti strategis dari sisi tata kelola ekonomi politik internasional dan pelajaran bagi Indonesia?

Sering kita tak menyadari bahwa tata kelola ekonomi politik dan hukum dunia ternyata begitu dekat dan berkait erat dengan tata kelola ekonomi politik dan hukum domestik. Artinya, perkembangan yang terjadi di tataran global akan sangat memengaruhi gerak langkah kita di tataran domestik. Biasanya, pengaruh perkembangan global ke domestik atau lokal cenderung lebih kuat dibanding sebaliknya dari domestik ke global.

Tantangan semua negara atau entitas ekonomi saat ini adalah bagaimana memainkan wacana dengan ikut menuliskan aturanaturan global baik berupa aturan hukum yang mengikat maupun norma dan nilai-nilai tata perilaku dalam berhubungan internasional. Namun, hampir sebagian besar aktor hubungan internasional pun memahami bahwa ikut memainkan wacana bukan perkara mudah.

Negara-negara besar yang memiliki sumber daya yang besar dan kuat biasanya lebih aktif dalam mengatur dan atau menentukan agenda. Bagi negara atau entitas ekonomi yang relatif lebih lemah atau kecil biasanya mereka menjaga sedemikian rupa dengan merespons tarikan global agar tidak sampai memusnahkan tata kelola domestik. Dengan kata lain, paling tidak, mereka harus mendapatkan keuntungan dari keikutsertaan dalam tata kelola global tersebut tanpa harus hanyut terbawa arus globalisasi.

Secara sederhana tata kelola dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, tata kelola yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum (legally-binding) ketika suatu negara menjadi anggota dari sebuah organisasi internasional. Contohnya, organisasi perdagangan dunia (WTO). Kedua, tata kelola yang bersifat longgar (loose) atau soft yang tidak memiliki ikatan hukum secara langsung bagi para pihak

yang terlibat. Sebagai contoh adalah berbagai forumforum para pemimpin dunia atau entitas ekonomi, korporasi, pemuka masyarakat sipil, tokoh dunia akademis, praktisi, dan lain-lain. Misalnya Forum Ekonomi Dunia (WEF), G-20 hingga APEC.

## **Pemaknaan Baru**

Pertemuan 21 pemimpin entitas ekonomi dunia ini merupakan salah satu contoh tata kelola lama yang dimaknai kembali. Sebenarnya APEC bukan hal yang baru. Bentuk kerja sama ekonomi Asia Pasifik ini pernah mati suri cukup lama sejak diinisiasi pada 1989 dan memperoleh momentum pada 1994 dengan Bogor Goal.

Seiring dengan hantaman krisis Asia tahun 1997 yang menjadi resesi berkepanjangan di tahun 2000-an, ide regionalisme ekonomi terbuka yang mencakup bentangan geografis yang sangat luas ini cenderung stagnan. Apalagi ketika negara-negara besar yang menjadi anggota APEC mengalami krisis domestik, regional, dan dunia yang berkepanjangan pada tahun 2000-an. Namun, pendulum berubah arah.

Negara-negara besar kemudian melihat Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik ini bisa dijadikan kerangka kerja yang menggerakkan berbagai potensi ekonomi politik dan strategis yang selama ini tak tergarap. Persengketaan bilateral maupun persoalan konflik regional bisa dikesampingkan demi kebangkitan ekonomi yang menjanjikan nisbah ekonomi yang besar sebagai berkah sebuah kerja sama.

APEC sebagai sebuah forum yang longgar dengan 21 anggota entitas ekonomi dunia menjanjikan pasar 3 miliar orang. Di kawasan ini pula 44% perdagangan dunia terjadi. Belum lagi bila dilihat dari luaran ekonomi global lebih dari 50% dihasilkan di Asia Pasifik. Bagi dunia, APEC menjadi semakin penting ketika AS dan Rusia menatap Asia secara lebih serius.

Di sisi lain, kemunculan China yang semakin kuat sebagai kekuatan regional Asia, bahkan telah menjadi partner dagang terbesar bagi negara-negara besar tersebut. Berbagai subtata kelola di kawasan Asia khususnya di bidang ekonomi bergulir secara signifikan. Misalnya, East Asia Summit (EAS), ASEAN+3, hingga wacana Asian Monetary Fund (AMF) yang menjadikan Asia lebih mandiri menyelesaikan masalahnya sendiri.

Belum lagi kerja sama bilateral yang mereka lakukan antara Rusia dan Jepang maupun Rusia dan China dalam pemenuhan suplai energi dalam negerinya. Bagi AS, 6 dari 11 partner dagang terbesarnya juga berasal dari kawasan ini. Australia pun sangat berkepentingan dengan makin dinamisnya kawasan ini. Singkatnya, APEC telah menjadi magnet bagi guliran kerja sama ekonomi yang berimbas pada penataan politik-strategis di kawasan Asia.

## **Peran Indonesia**

Nama besar Indonesia pernah tertoreh mewarnai perjalanan APEC dengan Bogor Goals yang menegaskan kawasan Asia Pasifik menjadi wilayah perdagangan dan investasi bebas yang terbuka pada 2010 bagi negara-negara maju dan 2020 bagi negaranegara berkembang. Dampaknya, sadar atau tidak, telah kita rasakan bersama saat ini. Indonesia akan menjadi tuan rumah tahun 2013.

Kepemimpinan Indonesia yang akan mengangkat tema ketahanan Asia Pasifik dan menjadikan sebuah penggerak pertumbuhan global sepertinya cukup menjanjikan. Namun jelas hal itu tidak

cukup. Indonesia harus berkaca dari Rusia yang tidak hanya berhasil memimpin APEC 2012 dan memberikan arah bagi perekonomian dunia.

Rusia berusaha menarik perhatian dunia untuk berinvestasi di kawasan pantai timur jauhnya. Vladivostok pun dipercantik dengan infrastruktur kelas dunia seperti bandara internasional, jembatan baru yang megah, dan Far Eastern Federal University yang menjadi venue pertemuan APEC. Rusia melakukan investasi tak kurang dari USD30 miliar selama enam tahun terakhir. Langkah ini merupakan investasi terbesar yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah untuk kawasan ini.

Bila mau berkaca, Indonesia bisa melakukan langkah yang lebih asertif, agresif, dan fokus. Misalnya memperjuangkan bagaimana MP3EI menjadi jualan yang konkret bagi investasi dari para anggota APEC. Bila ini berhasil, Pemerintah Indonesia berhasil memaknai bahwa dinamika tata kelola global memberikan manfaat bagi tata kelola domestik.

TIRTA N MURSITAMA, PhD Head, Centre for Business and Diplomatic Studies, Bina Nusantara University